



Determinan Penerimaan Pajak Di Negara-Negara Berpenghasilan Menengah

Anita Damajanti^{1)*}

E-mail Korespondensi: anitadamajanti@usm.ac.id

Program Studi Akuntansi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia¹⁾

INFO ARTIKEL

Proses Artikel

Dikirim : 02/01/2026

Diterima: 21/01/2026

Dipublikasikan: 23/01/2026

Akreditasi oleh
Kemenristekdikti
No.79/E/KPT/2023

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, khususnya di negara berpenghasilan menengah. Peningkatan penerimaan pajak dapat mendorong kemandirian keuangan di negara berpenghasilan menengah. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di negara-negara yang dikategorikan berpenghasilan menengah berdasarkan kriteria Bank Dunia tahun 2024. Penelitian ini menganalisis pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, *foreign direct investment*, industri manufaktur dan inflasi yang diprediksi sebagai determinan penerimaan pajak. Populasi penelitian ini yaitu negara berpenghasilan menengah sebanyak 108 negara. Sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 41 negara selama periode 2015-2024, Jumlah observasi dengan *balanced data panel* yaitu 410 observasi. Tahap pengolahan data meliputi analisis deskriptif statistik, pemilihan spesifikasi model regresi data panel, dan pengujian hipotesis. Berdasarkan hasil uji chow, uji Hausman, dan uji *Lagrange Multiplier* disimpulkan bahwa model regresi yang sesuai digunakan pada persamaan model ini yaitu model *Random Effect*. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi Eviews. Hasil uji hipotesis secara parsial dan secara simultan yaitu pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, *foreign direct investment*, industri manufaktur dan inflasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Hasil ini konsisten dengan penelitian terdahulu. Implikasi penelitian ini yaitu negara-negara berpenghasilan menengah sebaiknya fokus untuk meningkatkan akses investasi modal asing, meningkatkan transaksi perdagangan luar negeri, mendorong peningkatan industri manufaktur, serta mengedalikan inflasi agar dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak. Kemandirian keuangan negara yang berasal dari pajak diharapkan dapat mendorong negara-negara berpenghasilan menengah untuk meningkat menjadi kelompok negara berpenghasilan tinggi.

Kata kunci:

pertumbuhan ekonomi; keterbukaan perdagangan; *foreign direct investment*; industri manufaktur; inflasi

Abstract

Taxes are a major source of state revenue, especially in middle-income countries. Increasing tax revenue can promote financial independence in middle-income countries. This study aims to analyze the factors that influence tax revenue in countries categorized as middle-income according to the World Bank criteria in 2024. This study analyzes economic growth, trade openness, foreign direct investment, manufacturing industry, and inflation, which are predicted to be determinants of tax revenue. The population of this study comprises 108 middle-income countries. The sample meeting the criteria consists of 41 countries during the period 2015-2024, with a total of 410 observations in balanced panel data. The data processing stages include descriptive statistical analysis, selection of panel data regression model specifications, and hypothesis testing. Based on the results of the Chow test, Hausman test, and Lagrange Multiplier test, it is concluded that the appropriate regression model to use in this equation is the Random Effects model. Data processing was carried out using the Eviews application. The results of hypothesis testing, both partially and simultaneously, indicate that economic growth, trade openness, foreign direct investment, the manufacturing industry, and inflation significantly affect tax revenue. These results are consistent with previous studies. The implication of this study is that middle-income countries should focus on increasing access to foreign capital investment, boosting foreign trade transactions, promoting the growth of the manufacturing industry, and controlling inflation to enhance tax revenue. The financial independence of the state, derived from taxes, is expected to help middle-income countries advance to the high-income country group.

Keywords:

economic growth; trade openness; foreign direct investment; manufacturing industry; inflation



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Fungsi utama pajak adalah sebagai alat untuk memperoleh pendapatan bagi negara. Pajak menyumbang proporsi yang tinggi dari anggaran pendapatan pemerintah di sebagian besar negara, terutama negara berpendapatan menengah. Pajak bermanfaat untuk pembangunan negara; meningkatkan kemandirian keuangan dalam jangka panjang dan mengurangi ketergantungan dari bantuan luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, mobilisasi pendapatan domestik di negara-negara berkembang dengan penghasilan menengah menjadi *issue* utama dalam penentuan arah kebijakan pemerintah. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sosial.

Berdasarkan laporan bank dunia tahun 2024 terdapat 108 negara, atau lebih dari 50% negara di dunia, termasuk kategori negara berpenghasilan menengah (World_Bank, 2024). Negara yang dikategorikan berpenghasilan menengah berdasarkan klasifikasi bank dunia tahun 2024, yaitu negara yang memiliki pendapatan per kapita antara US\$1.136 - US\$13.845. (World_Bank, 2024). Negara berpenghasilan menengah menyumbang 40 persen dari aktivitas ekonomi global. Klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapita ditentukan oleh Bank Dunia dan diperbaharui setiap tahun. Negara-negara tersebut ditempati oleh tiga perempat dari populasi penduduk di dunia.

Negara berpenghasilan menengah mengalami perlambatan pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir. Perlambatan pertumbuhan sering terjadi di negara berpenghasilan menengah dibandingkan di negara berpenghasilan rendah atau tinggi. Suatu situasi di mana suatu negara berpendapatan menengah mengalami perlambatan pertumbuhan secara sistematis karena tidak mampu mengadopsi struktur ekonomi baru yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat pendapatan tinggi dikenal dengan istilah perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*). Terjadinya *fenomena middle income trap* mendorong dilakukannya penelitian ini pada negara berpenghasilan menengah

Terjadinya *fenomena middle income trap* mendorong dilakukannya penelitian ini pada negara berpenghasilan menengah. Penelitian ini menganalisis pertumbuhan ekonomi, *Foreign Direct Investment*, keterbukaan perdagangan, industri manufaktur, dan inflasi terhadap penerimaan pajak. Penelitian mengenai determinan penerimaan pajak telah dilakukan di berbagai negara, dengan berbagai metode. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan tidak adanya konsistensi hasil penelitian. Ha et al.(2022), dan Todorovic et al.(2024) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak, sedangkan penelitian Syahrullah, (2025) menyatakan inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian Celikay (2020), Ha et al.(2022), Listikarini & Wijaya (2023), Listikarini (2024), Wulandari & Wijaya (2024), Gnanngnon (2025) menyatakan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan Septiani & Sastradipraja (2023) keterbukaan perdagangan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Ha et al., (2022), Listikarini (2024), menyatakan bahwa *Foreign Direct Investment* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sementara Listikarini & Wijaya (2023) *Foreign Direct Investment* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian Celikay (2020), Ha et al.(2022), Listikarini (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan hasil penelitian Septiani & Sastradipraja (2023) pertumbuhan ekonomi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

Ha et al., (2022) menganalisis faktor penentu penerimaan pajak di delapan negara anggota ASEAN pada tahun 2000-2016. Temuan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa investasi asing dalam bentuk FDI, industri manufaktur, keterbukaan perdagangan, berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Celikay (2020) menganalisis perubahan indikator makroekonomi yang diprediksikan mempengaruhi rasio penerimaan pajak. Analisis data panel model dinamis dengan sistem *Generalized Method of Moments* (GMM) dilakukan pada 34 negara anggota organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD) pada periode 1993-2016. Hasil temuannya menunjukkan Pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan, jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan industri manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik dan positif terhadap beban pajak.

Pyvavar et.al (2023) menganalisis secara deskriptif hubungan antara inflasi dengan penerimaan pajak di negara-negara Eropa. Hasil analisisnya menyatakan bahwa kenaikan laju inflasi berhubungan dengan penurunan penerimaan pajak. Listikarini (2024) meneliti determinan penerimaan pajak penghasilan menggunakan data panel pada 12 negara di Amerika Latin pada periode 2008-2018. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, arus masuk *Foreign Direct Investment*, luas negara, keterbukaan perdagangan, *tax attractiveness index* mempengaruhi penerimaan pajak.

Penelitian Listikarini & Wijaya (2023) pada negara ASEAN-5 periode 2008-2018 menyimpulkan bahwa pendapatan per kapita, dan keterbukaan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Keterbukaan perdagangan memoderasi pengaruh pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak. *Foreign Direct Investment* tidak berpengaruh pada penerimaan pajak.

Wulandari & Wijaya (2024) menganalisis dampak keterbukaan perdagangan dan sektor jasa terhadap penerimaan pajak penghasilan di negara-negara Asia Timur dan Pasifik periode 2008 hingga 2019. Keterbukaan perdagangan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan pajak, sektor jasa berdampak negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengeluaran pemerintah memoderasi dampak sektor jasa terhadap penerimaan pajak penghasilan. Syahrullah (2025) meneliti pengaruh industri, inflasi, dan kurs rupiah terhadap penerimaan pajak di Indonesia pada periode 2013-2024. Hasilnya menyatakan bahwa industri, inflasi, dan kurs rupiah berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak.

Penelitian ini menganalisis faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pada negara-negara yang dikategorikan berpenghasilan menengah periode 2015-2024. Penelitian ini berbeda dengan sebelumnya dimana fokus objek penelitian yaitu di negara berpenghasilan menengah. Terjadinya fenomena *middle income trap* mendorong dilakukannya penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kondisi perekonomian yang dapat berdampak pada penerimaan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Justifikasi

Teori ini merupakan justifikasi terhadap pemungutan pajak oleh negara kepada warganya. Teori perpajakan yang didasarkan atas teori justifikasi antara lain:

(1) Teori Kedaulatan: Teori ini menyatakan bahwa hak pemungutan pajak oleh negara terjadi karena adanya kedaulatan atau kekuasaan negara untuk memerintah. Pajak menjadi kontribusi bagi negara untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga kedaulatan dan menjalankan pemerintahan, contohnya menjaga ketertiban dan keamanan, dan memberikan layanan administrasi pemerintahan.

(2) Teori Kontraktual: Pendekatan ini menyarankan adanya kesepakatan tidak tertulis antara pemerintah dan wajib pajak, di mana pajak merupakan pembayaran atas layanan publik dan manfaat yang diterima dari negara.

(3) Teori Etis/Retributif. Teori ini memandang pemungutan pajak sebagai kewajiban moral dan kontribusi proporsional terhadap pengeluaran masyarakat, yang menyediakan lingkungan dan fasilitas untuk kegiatan ekonomi, (Taubinsky & Rees-jones, 2018), (Dědeček & Dudzich, 2022).

Teori Pemungutan Pajak Adam Smith

Teori Pemungutan Pajak yang diprakarsai oleh Adam Smith dalam “The Wealth of Nations”, meliputi:

- (1) Keadilan (*Equity*): Pajak harus dipungut berdasarkan kondisi dan kemampuan membayar wajib pajak. Konsep ini melahirkan prinsip kemampuan membayar, yang sering kali mengimplikasikan struktur pajak progresif di mana individu berpenghasilan lebih tinggi membayar proporsi penghasilan yang lebih besar dalam bentuk pajak.
- (2) Kepastian: Waktu, cara, dan jumlah pembayaran pajak harus jelas dan dapat diprediksi oleh wajib pajak, bukan sewenang-wenang atau diserahkan pada kebijakan pejabat pajak.
- (3) Kenyamanan: Metode dan waktu pembayaran pajak harus nyaman bagi wajib pajak.
- (4) Efisiensi (Ekonomi): Biaya pengumpulan pajak bagi pemerintah harus minimal dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh, dan sistem pajak tidak boleh secara tidak semestinya mengubah keputusan ekonomi atau alokasi sumber daya.

Teori Ekonomi Modern

Teori perpajakan kontemporer dibangun di atas dasar ini dengan model ekonomi yang lebih kompleks:

- (1) Prinsip Manfaat: Individu harus membayar pajak sesuai dengan manfaat yang mereka terima dari layanan pemerintah, mirip dengan harga untuk layanan tertentu. Hal ini sulit diterapkan secara universal karena banyak layanan publik (misalnya, pertahanan nasional, kepolisian) memberikan manfaat umum yang sulit diukur untuk setiap individu.
- (2) Teori Perpajakan Optimal: Teori ini bertujuan menstimulus sistem pajak yang mencapai tujuan pendapatan dan distribusi pendapatan yang diinginkan dengan tingkat inefisiensi atau distorsi ekonomi yang paling rendah (yaitu, meminimalkan dampak pada keputusan orang untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi).
- (3) Pajak Pigou: Ini adalah pajak khusus yang dikenakan pada kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif (biaya yang ditanggung oleh pihak ketiga, seperti polusi) untuk menginternalisasi biaya tersebut dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.
- (4) Teori Beban Pajak: Bidang ini mempelajari di mana beban uang nyata dari suatu pajak jatuh setelah kemungkinan pergeseran antara pihak-pihak (misalnya, dari produsen ke konsumen melalui harga yang lebih tinggi), karena pembayar awal tidak selalu menjadi pihak yang menanggung pajak tersebut (Christians, 2018).

Penerimaan Pajak

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan suatu negara untuk memperoleh pendapatan yang akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan. Penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan proksi rasio pajak untuk mengukur kinerja penerimaan pajak di suatu negara, (Yossinomita et al., 2025). Rasio pajak merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pajak jika dibandingkan dengan total produksi ekonomi yang dihasilkan (Annuar et al., 2025), Anjarwi (2025), Darma et al.(2022). Rasio pajak yang tinggi menunjukkan kapasitas fiskal yang tinggi bagi pemerintah. Rasio pajak memberi informasi kemampuan fiskal yang dimiliki suatu negara untuk membiayai pengeluaran publik pada infrastruktur, program sosial, dan stabilitas ekonomi. Rasio pajak dapat digunakan untuk beberapa tujuan yaitu:

- (1) Mengukur kapasitas fiskal. *Tax ratio* menunjukkan indikasi kemandirian finansial suatu negara.
- (2) Membandingkan kinerja perpajakan dengan negara lain.
- (3) Memberikan dukungan informasi untuk mengambil kebijakan. *Tax ratio* membantu pemerintah mengidentifikasi masalah potensial (seperti penghindaran pajak atau basis pajak yang sempit) dan merumuskan kebijakan serta reformasi pajak yang efektif.

Tax ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- (1) Struktur ekonomi. Negara dengan sektor pertanian atau sektor informal yang besar seringkali memiliki rasio pajak yang lebih rendah karena area ini lebih sulit untuk dipungut pajaknya secara efektif.
- (2) Kebijakan dan insentif pajak. Keputusan pemerintah untuk memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi dapat mengurangi penerimaan pajak secara langsung.
- (3) Kepatuhan dan administrasi pajak. Tingkat kepatuhan pajak sukarela dan efisiensi lembaga pemungut pajak berperan penting dalam penerimaan pajak.
- (4) *Shadow ekonomi* (Ekonomi bayangan) yaitu aktivitas ekonomi yang tidak dilaporkan. Besarnya "ekonomi bayangan" mengurangi basis pajak potensial, yang mengarah pada rasio pajak yang lebih rendah.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi suatu negara selama periode tertentu. Kemampuan ekonomi suatu negara diukur berdasarkan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan, yang disebut Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pendekatan nominal atau riil. Pertumbuhan ekonomi nominal mengacu pada peningkatan nilai produksi dalam dolar dari waktu ke waktu. Peningkatan ini mencakup volume produksi maupun harga barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ekonomi riil yaitu peningkatan hanya dalam volume produksi, tanpa mempertimbangkan efek perubahan harga. Pertumbuhan ekonomi riil lebih mencerminkan seberapa banyak suatu negara memproduksi pada periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya lainnya

Pertumbuhan ekonomi, yang diukur dengan laju pertumbuhan PDB per kapita, mencerminkan tingkat perkembangan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pemerintah akan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengumpulkan pajak. Variabel ini diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi banyak digunakan dalam banyak penelitian. Celikay (2020), Ha et al.(2022), Listikarini (2024) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hipotesis 1: pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak

Keterbukaan Perdagangan

Ketika suatu negara membuka diri terhadap perdagangan internasional, terdapat kemungkinan pemerintah negara tersebut akan meningkatkan perlindungan terhadap produksi domestik melalui langkah-langkah tertentu, seperti menaikkan pajak atau menerapkan kuota perdagangan, (Wulandari & Wijaya, 2024). Di negara maju, pajak atas perdagangan internasional juga berdampak positif terhadap penerimaan pajak karena ketika kegiatan perdagangan diperluas, daya saing ekonomi meningkat, sehingga lebih banyak pajak yang dapat dipungut. Keterbukaan perdagangan mengakibatkan berkurangnya hambatan perdagangan pada impor yang dapat menyebabkan peningkatan volume impor sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak dari perdagangan. Keterbukaan perdagangan diukur dengan total volume ekspor dan impor. Transaksi perdagangan Internasional menunjukkan seberapa besar kontribusi perdagangan ekspor dan impor terhadap perekonomian suatu negara. Pajak atas aktivitas perdagangan internasional

termasuk salah satu sumber pendapatan yang penting di banyak negara. Celikay (2020), Ha et al.(2022), Listikarini & Wijaya (2023), Listikarini (2024), Wulandari & Wijaya (2024), Gnangnon (2025) menyimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hipotesis 2: Keterbukaan perdagangan secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak

Industri Manufaktur

Industri manufaktur adalah industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Industri manufaktur menambahkan nilai pada suatu bahan dengan mengubah sifat atau bentuknya atau menggabungkannya dengan bahan lain. Industri manufaktur merupakan sumber utama inovasi proses dan produk yang penting bagi pertumbuhan produktivitas. Industri manufaktur menyediakan barang antara bagi industri lain untuk mendorong peningkatan rantai global. Industri manufaktur merupakan dasar untuk persaingan internasional dan fokus kebijakan bagi negara-negara yang sedang dan belum mengindustrialisasi (Gnangnon, 2025) .

Industri manufaktur adalah upaya suatu negara untuk menghasilkan kekayaan dengan memperdagangkan produk bernilai tambah dengan negara lain di dunia dan menggunakan kekayaan ini untuk memenuhi kebutuhannya, terutama bagi negara dengan sumber daya terbatas. Meskipun demikian, sebuah negara yang kaya sumber daya tidak dapat mencapai kemakmuran jika kurang memiliki pengetahuan di bidang manufaktur. Sebaliknya, sebuah negara dengan sumber daya yang sedikit dapat menjadi negara kaya jika memiliki pengetahuan di bidang manufaktur, (Celikay, 2020).

Di negara-negara berpenghasilan menengah, sektor manufaktur merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor manufaktur dapat menciptakan keterkaitan dengan sektor lain dalam perekonomian dan memiliki potensi besar untuk menghasilkan keuntungan, (Gnangnon, 2025). Pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pajak langsung melalui pajak penghasilan perusahaan dan pajak tidak langsung melalui pajak penjualan serta pajak konsumsi khusus atas produk domestik, (Ha et al., 2022). Selain itu, lebih mudah mengumpulkan pajak di sektor manufaktur dibandingkan di sektor pertanian. Celikay (2020), Gnangnon (2025), Ha et al. (2022) menyimpulkan adanya pengaruh signifikan industri manufaktur terhadap penerimaan pajak.

Hipotesis 3: Industri Manufaktur secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak

Foreign Direct Investment

Salah satu ciri khas dari globalisasi ekonomi dunia adalah liberalisasi dan perluasan aliran investasi asing secara global. *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan pada perusahaan lain di luar negeri dengan tujuan antara lain menguasai aset, melakukan pengendalian manajemen, atau memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki di negara asal. Contoh: membuka pabrik baru, mengakuisisi saham pengendali di perusahaan asing, atau mendirikan anak perusahaan. Investasi FDI merupakan investasi yang dilakukan dalam jangka panjang. Istilah FDI digunakan untuk membedakan dengan investasi dalam bentuk portofolio surat-surat berharga yang seringkali bersifat jangka pendek.

Berdasarkan sudut pandang negara investor FDI dibagi menjadi

- (1) FDI horisontal yaitu FDI yang dilakukan dengan tujuan ekspansi secara horisontal, yaitu untuk memproduksi barang yang sama atau sejenis di negara tujuan, differensiasi produk, atau mengoptimalkan keunggulan yang bersifat monopolistik seperti paten.
- (2) FDI vertikal dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan mentah atau untuk mendekati konsumen dengan cara melakukan akuisisi jalur distribusi.
- (3) FDI konglomerasi meliputi FDI yang dilakukan secara horisontal dan vertikal

Berdasarkan sudut pandang negara penerima investasi FDI dibagi menjadi

- (1) FDI substitusi impor
- (2) FDI untuk meningkatkan ekspor
- (3) FDI yang diprakarsai oleh pemerintah

FDI dapat juga diklasifikasikan menjadi tipe ekspansif dan defensif. FDI ekspansif bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan spesifik perusahaan di negara tuan rumah. Jenis FDI ini memiliki manfaat tambahan berupa kontribusi terhadap pertumbuhan penjualan perusahaan yang berinvestasi baik di dalam maupun di luar negeri. Di sisi lain, mereka menyatakan bahwa FDI defensif mencari tenaga kerja murah di negara tuan rumah dengan tujuan mengurangi biaya produksi, (Cole et al., 2017).

Variabel FDI dihitung berdasarkan kontribusi aliran masuk FDI bersih terhadap PDB.

Banyak negara yang mencari FDI dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkenalkan teknologi baru dan pengetahuan manajerial, dan menyediakan modal untuk pembangunan negara. Aliran masuk FDI memiliki potensi untuk mempengaruhi pendapatan pajak, tetapi dampaknya tidak jelas, karena tergantung pada kebijakan negara penerima, Ha et al.(2022). Jika negara penerima memiliki kebijakan preferensial untuk menarik FDI, termasuk insentif pajak, aliran masuk FDI diperkirakan akan berdampak negatif terhadap pendapatan pajak. Namun, FDI dapat mendorong daya saing nasional dan meningkatkan pendapatan pajak negara. Ha et al.(2022), dan Listikarini (2024) menyatakan bahwa FDI berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

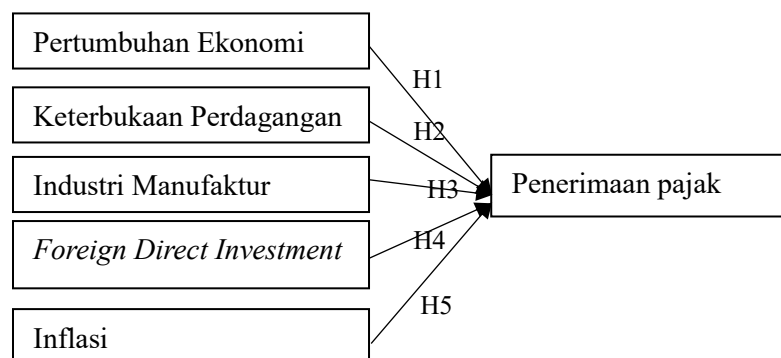
Hipotesis 4: FDI secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak

Inflasi

Inflasi merupakan variabel makroekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli, harga barang, dan basis pajak secara menyeluruh (Syahrullah, 2025). Inflasi, dianggap sebagai proksi untuk stabilitas makroekonomi. Ketika inflasi meningkat, hal ini mengurangi daya beli dan kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak Ha et al.(2022). Hasil penelitian Ha et al.(2022), dan Todorovic et al.(2024) menunjukkan bahwa inflasi tinggi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian Syahrullah, (2025), yaitu bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa inflasi dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap penerimaan pajak.

Hipotesis 5: Inflasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak.

Gambar berikut ini menampilkan kerangka pikir teoritis yang disusun berdasarkan kajian pustaka



Gambar 1. Kerangka Pikir teoritis

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian yaitu seluruh negara yang dikategorikan sebagai negara berpenghasilan menengah berdasarkan data *World Development Indicators* (WDI) yang dipublikasikan oleh Bank Dunia. Periode amatan selama sepuluh tahun yaitu tahun 2015-2024. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria yaitu: 1) Negara berpenghasilan menengah yang tidak mengalami pergeseran kelompok penghasilan pada periode 2015-2024, 2) Data yang terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini tersedia secara lengkap selama periode 2015-2024. Data yang memenuhi kriteria sampel dianalisis dengan regresi data panel. Data panel adalah sekumpulan data yang menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data antar individu (misal: perusahaan, negara), yang dikenal dengan istilah data *cross section*. Data panel menganggap tiap – tiap observasi adalah heterogen. Data *time series* dinotasikan dengan huruf *t* dan data lintas-seksi dinotasikan dengan huruf *i*. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk *balanced* data panel, yaitu data panel yang memiliki unit amatan yang sama untuk setiap periode yang diteliti, sehingga total jumlah observasi yaitu sebesar $N \text{ (unit)} \times T \text{ (periode)}$. Estimasi model regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan model *Common Effect*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*, (Hijrawati et al., 2022) (Ghozi, 2018), (Liapis et al., 2020). Model *Common Effect* pada dasarnya adalah model regresi *ordinary least square* (OLS) yang menggabungkan data runtut waktu dan data *cross-section*. Model *fix effect* menggunakan asumsi bahwa kemiringan garis regresi pada setiap individu yang diamati tetap tetapi intersepnya berbeda (Permata & Nursaidah, 2019) (Munandar, 2017). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pertumbuhan ekonomi, *Foreign Direct Investment*, Industri Manufaktur, dan inflasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari database *World Development Indicator* (WDI), (Databank.worldbank.org, 2025). Pengukuran variabel ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran variabel	Sumber
Penerimaan Pajak	Persentase penerimaan pajak terhadap PDB	Celikay (2020), Ha et al.(2022), Listikarini & Wijaya (2023)
Pertumbuhan Ekonomi	Persentase perubahan PDB tahun berjalan dibandingkan dengan PDB tahun sebelumnya	
<i>Foreign Direct Investment</i>	Persentase <i>net inflow</i> FDI terhadap PDB per kapita	
Keterbukaan Perdagangan	Persentase jumlah ekspor dan impor terhadap PDB per kapita	
Industri manufaktur	Persentase nilai tambah industri manufaktur terhadap PDB per kapita	
Inflasi	inflasi tahunan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK)	

Sumber: dirangkum dari hasil penelitian terdahulu

Tahapan analisis data yaitu: 1) Analisis *deskriptif statistic*, 2) Memilih model regresi yang sesuai untuk penelitian ini dengan uji chow, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*, dan 3) Menganalisis tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dan secara simultan dengan uji *t* dan uji *F* (Septianingsih, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Bank Dunia tahun 2024 terdapat 108 negara yang tergolong berpenghasilan menengah. Terdapat sembilan negara yang dikeluarkan sebagai sampel karena mengalami pergeseran kelompok penghasilan dari penghasilan menengah menjadi berpenghasilan tinggi dan dari berpenghasilan rendah menjadi berpenghasilan menengah. Negara yang tidak mengalami pergeseran kelompok penghasilan selama periode 2015-2024 sebanyak 99 negara. Selanjutnya sebanyak 58 negara dikeluarkan dari sampel penelitian karena data tidak tersedia atau tersedia tidak lengkap selama periode 2015-2024. Jumlah negara yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 41 negara selama periode amatan 10 tahun, mulai tahun 2015-2024. Total jumlah observasi yaitu 41 negara x 10 tahun = 410 observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan model estimasi regresi *balanced* data panel, menggunakan aplikasi *evIEWS*, (Anwar & Nursnan, 2025).

Tabel.2. Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif Statistik

	Penerimaan pajak	Pertumbuhan Ekonomi	FDI	Keterbukaan Perdagangan	Industri Manufaktur	Inflasi
Mean	16.40	2.44	79.20	13.28	3.00	5.28
Median	16.61	2.79	76.18	12.29	2.41	3.76
Maximum	27.09	15.66	166.15	29.83	17.20	72.31
Minimum	7.52	-14.55	24.32	3.95	-37.17	-1.61
Std. Dev.	4.56	4.11	30.76	6.18	3.92	6.68
Observation	410	410	410	410	410	410

Sumber: output olah data, 2025

Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif data yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata dan standar deviasi. Rasio penerimaan pajak sebesar 27,09 persen terjadi pada negara Botswana pada tahun 2014. Rasio penerimaan pajak sebesar 7,52 persen terjadi pada negara Cina pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi dengan nilai -14,55 terjadi pada negara Mauritius pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi dengan nilai 15,66 persen terjadi pada negara Moldova pada tahun 2021. Persentase *Foreign Direct Investment* terhadap Produk Domestik Bruto dengan nilai 24,32 persen terjadi pada negara Brazil pada tahun 2017. Persentase *Foreign Direct Investment* terhadap Produk Domestik Bruto dengan nilai 166,15 persen terjadi pada negara North Macedonia pada tahun 2022. Persentase jumlah ekspor dan impor terhadap PDB dengan nilai 3,95 persen terjadi pada negara Samoa pada tahun 2020. Persentase jumlah ekspor dan impor terhadap PDB dengan nilai 29,83 persen terjadi pada negara Cina pada tahun 2014. Rasio nilai tambah industri manufaktur terhadap PDB sebesar -37,17 persen terjadi pada negara Mongolia pada tahun 2016 Rasio nilai tambah industri manufaktur terhadap PDB sebesar 17,20 persen terjadi pada negara Mongolia pada tahun 2019. Inflasi sebesar -1,61 terjadi pada negara Thailand pada tahun 2022. Inflasi sebesar 72,31 persen terjadi pada negara Turki pada tahun 2022.

Tahap selanjutnya setelah melakukan analisis deskriptif statistik, yaitu melakukan pemilihan model regresi yang tepat dengan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Uji chow digunakan untuk memilih model *Fixed Effect* Model atau *Common Effect*.

Hipotesis:

H₀: *Common Effect* Model lebih baik daripada *Fixed Effect* Model

H₁: *Fixed Effect* Model lebih baik daripada *Common Effect* Model

Jika nilai *p-value* lebih besar dari 0,05, pada tingkat signifikansi 5%, maka H₀ diterima dan H_a ditolak; sebaliknya jika *p-value* lebih kecil dari 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan di tabel 4 diketahui nilai *p-value* = 0,0000 lebih kecil dari 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Jadi disimpulkan bahwa estimasi *Fixed Effect* Model lebih baik daripada *Common Effect* Model

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	91.815059	(40,363)	0.0000
Cross-section Chi-square	987.488288	40	0.0000

Sumber: output olah data, 2025

Hausman tes digunakan untuk membantu pemilihan model *fix effect* atau *random effect* pada regresi data panel.

Hipotesis:

H₀: model *random effect* yang lebih baik; H₀ diterima jika $p > 0,05$

H₁: model *fix effect* yang lebih baik; H₁ diterima jika $p < 0,05$

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan di tabel 5 diketahui nilai *p-value* = 0.3341 lebih besar dari 0,05, maka H₀ diterima dan H_a ditolak. Jadi disimpulkan bahwa estimasi *Random Effect* Model lebih baik daripada *Fixed Effect* Model.

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.722689	5	0.3341

Sumber: output olah data, 2025

Uji *Lagrange Multiplier* (LM) juga dikenal dengan *breusch-pagan multiplier test* dikembangkan oleh breusch pagan pada tahun 1980. Uji LM tes digunakan untuk menentukan apakah regresi *random effect* atau regresi OLS *pooled* data yang lebih baik.

Hipotesis:

H₀: *random effect* tidak signifikan

H₁: *random effect* signifikan

Jika nilai $p > 0,05$ maka yang dipilih adalah regresi OLS *pooled* data

Jika nilai $p < 0,05$ maka yang dipilih adalah regresi model *random effect*

Hasil uji *Lagrange Multiplier* pada tabel 6 berikut ini menunjukkan nilai *p-value* Breusch-Pagan sebesar 0,0000, artinya model REM lebih tepat digunakan dibandingkan model CEM.

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	935.3145 (0.0000)	4.487310 (0.0341)	939.8018 (0.0000)
Honda	30.58291 (0.0000)	-2.118327 (0.9829)	20.12750 (0.0000)
King-Wu	30.58291 (0.0000)	-2.118327 (0.9829)	13.91833 (0.0000)
Standardized Honda	33.66705 (0.0000)	-1.963372 (0.9752)	18.33226 (0.0000)
Standardized King-Wu	33.66705 (0.0000)	-1.963372 (0.9752)	11.78203 (0.0000)
Gourieroux, et al.	--	--	935.3145 (0.0000)

Sumber: output olah data, 2025

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Model Regresi Secara Parsial

<i>Variabel Dependen Penerimaan Pajak</i> <i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Prob.</i>
C	33.26295	0.0000
Pertumbuhan Ekonomi	0.016517	0.0439
<i>Foreign Direct Investment</i>	0.052967	0.0000
Keterbukaan Perdagangan	0.270477	0.0001
Industri manufaktur	0.052786	0.0122
Inflasi	-1.916379	0.0050
F statistik = 0,0000		
Adjusted R ² = 0,64303		
$\alpha = 5\%$		

Sumber: *output* olah data views, 2025

Tabel 7 menunjukkan nilai koefisien dan *p-value* pada regresi model *Random Effect*. Koefisien regresi Pertumbuhan ekonomi yaitu 0,016517 dengan nilai *p* sebesar $0,0439 < 0,05$, jadi H1 diterima. Pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kenaikan satu satuan pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0.016517. Koefisien regresi *Foreign Direct Investment* yaitu 0.052967 dengan nilai *p* sebesar $0.0000 < 0,05$, jadi H2 diterima. *Foreign Direct Investment* berpengaruh signifikan pada

penerimaan pajak, dimana kenaikan satu satuan *Foreign Direct Investment* akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0.052967. Koefisien regresi Keterbukaan Perdagangan yaitu 0.270477 dengan nilai p sebesar $0.0001 < 0,05$, jadi H3 diterima. Keterbukaan Perdagangan secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kenaikan satu satuan variabel Keterbukaan Perdagangan akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0.270477. Koefisien regresi Industri manufaktur yaitu 0.052786 dengan nilai p sebesar $0,0122 < 0,05$, jadi H4 diterima. Industri manufaktur secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kenaikan satu satuan variabel Industri manufaktur akan diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0.270477. Koefisien regresi inflasi yaitu -1.916379 dengan nilai p sebesar $0.0050 < 0,05$, jadi H5 diterima. Inflasi berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak, dimana kenaikan satu satuan variabel inflasi akan diikuti dengan penurunan penerimaan pajak sebesar 1.916379.

Hasil pengujian tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama diperoleh nilai probabilitas F statistik sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini diartikan bahwa penerimaan pajak, FDI, keterbukaan perdagangan, industri manufaktur, dan inflasi secara bersamaan berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak. Nilai koefisien determinasi yang diukur dengan *adjusted R square* diperoleh sebesar 0,64303. Simpulan dari hasil pengujian ini yaitu variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 64,3%. Persamaan Regresi Model *Random Effect* dirumuskan berdasar data pada tabel 7 sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak} = 33.265 + 0.016517\text{Pertumbuhan Ekonomi} + 0.052967\text{Foreign Direct Investment} + 0.270477\text{Keterbukaan Perdagangan} + 0.052786\text{Industri manufaktur} - 1.916\text{Inflasi}$$

Pembahasan

Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan Pajak

Penelitian ini mendukung hipotesis-1 yang menyatakan Pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi suatu negara selama periode tertentu, yang diukur berdasarkan total produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan peningkatan produksi dan kegiatan usaha perusahaan. Hal ini berpotensi meningkatkan laba usaha dan berpengaruh pada peningkatan pajak yang dibayar oleh perusahaan. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan penerimaan pajak melalui pendapatan per kapita. Ketika pendapatan per kapita masyarakat mengalami kenaikan, hal ini akan diikuti dengan peningkatan kemampuan membayar pajak khususnya pajak penghasilan, baik untuk badan maupun orang pribadi. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Celikay (2020), Ha et al.(2022), Listikarini (2024).

Keterbukaan Perdagangan dan Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis-2 yang menyatakan keterbukaan perdagangan secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Koefisien regresi menunjukkan arah positif artinya peningkatan keterbukaan perdagangan yang diukur dengan total volume ekspor dan impor, akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Temuan ini konsisten dengan Celikay (2020), Ha et al.(2022), Listikarini & Wijaya (2023), Listikarini (2024), Wulandari & Wijaya (2024), Gnanon (2025). Keterbukaan perdagangan mengakibatkan pengurangan hambatan perdagangan pada impor yang dapat menyebabkan peningkatan volume impor sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari perdagangan. Peningkatan ekspor dan impor di sektor publik dan swasta karena liberalisasi perdagangan itu dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dan peningkatan upah bagi karyawan. Liberalisasi perdagangan cenderung memperluas basis pajak, sehingga meningkatkan penerimaan pajak domestik.

Industri Manufaktur dan Penerimaan Pajak

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis-3 yang menyatakan bahwa industri manufaktur secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Koefisien regresi menunjukkan arah positif, artinya peningkatan output industri manufaktur berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan output industri mendorong kenaikan nilai produksi, penjualan, dan konsumsi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara. Pertumbuhan sektor industri merupakan fondasi utama peningkatan kapasitas fiskal, karena semakin tinggi volume produksi akan memperluas basis pajak korporasi. Sektor manufaktur menciptakan keterkaitan dengan sektor lain dalam perekonomian dan memiliki potensi menghasilkan keuntungan yang tinggi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Celikay (2020), Gnangnon (2025), Ha et al. (2022) yang menemukan bahwa peningkatan aktivitas industri meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan potensi pajak.

***Foreign Direct Investment* dan Penerimaan Pajak**

Penelitian ini mendukung hipotesis-4 yang menyatakan bahwa FDI secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Koefisien regresi menunjukkan arah positif artinya peningkatan arus masuk investasi asing dalam bentuk FDI berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ha et al.(2022), dan Listikarini (2024). Arus masuk investasi asing mendorong transfer teknologi, pengetahuan dan manajerial oleh perusahaan induk pada anak perusahaan dan berdampak pada peningkatan produktivitas. FDI juga berpotensi memicu berdirinya perusahaan multinasional baru dan peningkatan skala usaha. Peningkatan produktivitas, berdirinya perusahaan baru dan perluasan skala usaha akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Inflasi dan Penerimaan Pajak

Penelitian ini mendukung hipotesis-5 yang menyatakan inflasi secara signifikan mempengaruhi penerimaan pajak. Koefisien regresi negatif artinya kenaikan inflasi berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ha et al.(2022), dan Todorovic et al.(2024). Inflasi dianggap sebagai manifestasi faktor yang tidak menguntungkan dalam perkembangan ekonomi. Kenaikan harga memiliki dampak negatif terhadap hubungan ekonomi dan fungsi entitas bisnis. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan dan penurunan laju pertumbuhan produksi barang dan jasa. Tekanan inflasi berdampak pada kenaikan biaya hidup dan melemahkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Hal ini mengakibatkan penurunan keuntungan dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Kebijakan pajak dapat berperan sebagai penggerak struktural yang penting bagi pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Sebagai alat kebijakan, kebijakan ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi beberapa tantangan paling mendesak pada masa kini, termasuk perlambatan pertumbuhan global, melambatnya peningkatan produktivitas, meningkatnya ketimpangan, penuaan populasi, dan kebutuhan akan keberlanjutan lingkungan.

Untuk mencapai ekonomi yang lebih maju, negara-negara berpendapatan menengah memerlukan dua tahap transisi. Tahap pertama yaitu transisi dalam investasi dilengkapi dengan injeksi, sehingga negara-negara tersebut dapat meniru dan menyebarkan teknologi modern. Pada transisi kedua, inovasi ditambahkan ke dalam kombinasi investasi dan injeksi, sehingga negara-negara berpendapatan menengah dapat fokus pada membangun kemampuan domestik untuk menambah nilai pada teknologi global. dan pada akhirnya menjadi inovator itu sendiri.

Negara-negara berpendapatan menengah perlu menerapkan strategi investasi, injeksi, dan inovasi agar dapat bergerak keluar dari status berpendapatan menengah. Negara dapat melakukan diferensiasi beban pajak dengan berbagai jenis pajak yang berbeda atau memperluas basis pajak

dan mengurangi beban pemungutan pajak yang mahal dan tidak efisien. Peningkatan pendapatan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan melakukan pemantauan terhadap langkah-langkah reformasi pajak agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Perpajakan adalah strategi yang layak untuk keluar dari ketergantungan pada bantuan asing dalam jangka panjang. Reformasi pajak sering kali sulit dilakukan karena adanya kelompok kepentingan yang diuntungkan dari sistem saat ini. Sementara itu, otoritas pajak mengalami keterbatasan kapasitas akibat kekurangan staf terampil dan kurangnya infrastruktur modern seperti teknologi dan sarana pendukung lainnya. Ekonomi negara berkembang juga sulit dikenakan pajak mengingat besarnya sektor pertanian, basis pajak yang kecil, dan tingginya tingkat informalitas. Reformasi pajak diperlukan untuk memperkuat basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak agar rasio pajak semakin meningkat. Langkah-langkah reformasi pajak penghasilan badan terdiri dari insentif pajak untuk mendorong investasi di sektor strategis dan menargetkan kenaikan pajak di sektor dengan keuntungan tinggi atau industri strategi. Reformasi pajak pertambahan nilai ditujukan untuk mendorong konsumsi melalui pemberian tarif yang lebih rendah untuk barang dan jasa tertentu atau dengan menambah daftar item yang dibebaskan dari pajak. Reformasi pajak penghasilan pribadi dan kontribusi jaminan sosial di negara berpendapatan rendah dan menengah ditujukan untuk memberi dukungan kepada rumah tangga dan pekerja melalui pengurangan dan tunjangan yang lebih tinggi, memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak. Negara berpenghasilan menengah perlu mengurangi hambatan regulasi pajak bagi perusahaan dan pekerja. Terjadinya pandemi covid-19, berakibat banyak negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan melakukan pekerjaan dengan sistem jarak jauh. Sistem ini berdampak pada layanan administrasi perpajakan dan kepatuhan pajak. Penguatan fitur digitalisasi administrasi layanan pajak diperlukan untuk optimalisasi kepatuhan wajib pajak, dan peningkatan penerimaan pajak. Peningkatan pada kinerja administrasi perpajakan dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan yang lebih baik. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum pajak merusak kepercayaan terhadap sistem dan menciptakan ketidakadilan, di mana wajib pajak yang patuh dihukum sementara pengemplang memperoleh keuntungan yang tidak adil. Kualitas layanan publik juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan moral pajak, di mana wajib pajak menilai bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan lebih cenderung mematuhi aturan pajak. Selain itu, dukungan publik juga merupakan syarat penting bagi keberhasilan pelaksanaan reformasi.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi, keterbukaan perdagangan, *Foreign Direct Investment*, Industri manufaktur dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di negara-negara yang dikategorikan berpenghasilan menengah menurut Bank Dunia. Negara-negara berpenghasilan menengah sebaiknya mempercepat restrukturisasi ekonomi untuk mencapai industrialisasi dan modernisasi serta meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap penerimaan negara yang berasal dari pajak. Negara berpenghasilan menengah sebaiknya fokus pada kebijakan perdagangan internasional karena langkah ini tidak hanya membantu negara dalam mengumpulkan pajak melalui aktivitas impor dan ekspor, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur, sehingga secara tidak langsung meningkatkan pendapatan pajak. Kemandirian keuangan negara yang berasal dari pajak diharapkan dapat mendorong negara-negara berpenghasilan menengah untuk meningkat menjadi kelompok negara berpenghasilan tinggi dan keluar dari perangkap penghasilan menengah (*middle income trap*).

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu banyaknya negara yang tidak memiliki data lengkap terkait variabel yang diteliti selama periode 2015-2024. Hal ini karena penelitian ini menggunakan metode regresi *balanced* data panel, dimana jumlah observasi harus sama selama sepuluh tahun berturut-turut. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode *unbalance* data panel yang memungkinkan penggunaan jumlah observasi yang tidak sama selama periode penelitian yang diobservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarwi, A. W. (2025). Tax Burden And Poverty In Lower-Middle-Income Countries: The Moderating Role of Fiscal Freedom. *Development Studies Research*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2025.2466511>
- Annuar, H. A., Isa, K., & Ibrahim, S. A. (2025). Malaysian Corporate Tax Rate And Revenue : The Application of Ibn Khaldun Tax Theory. *International Journal of Islamic Fianance*, 10(2), 251–262. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0011>
- Anwar, & Nursnan, M. (2025). *Buku Ajar Analisis Regresi Data Panel Dengan Aplikasi Eviews*. Pustaka Bangsa.
- Celikay, F. (2020). Dimensions of Tax Burden : A Review On OECD Countries. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(49), 27–43. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-12-2018-0138>
- Christians, A. (2018). *Introduction to Tax Policy Theory*. [https://doi.org/Christians, Allison, Introduction to Tax Policy Theory \(May 29, 2018\). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3186791 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3186791](https://doi.org/Christians, Allison, Introduction to Tax Policy Theory (May 29, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3186791 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3186791)
- Cole, M. A., Elliott, R. J. R., & Zhang, L. (2017). Foreign Direct Investment and the Environment. *Annual Review*, 465–487. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102016-060916>
- Darma, S. S., Sudarti, Z., Richmayati, M., & Fadlilah, A. H. (2022). Analisis Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan pajak) Terhadap Rasio Pajak Secara Nasional dan Secara Regional (Kabupaten dan Kota Tangerang). *Scientific Journal Of Reflection*, 5(2), 370–380. <https://doi.org/10.37481/sjr.v5i2.472>
- Databank.worldbank.org. (2025). *World Development Indicators*. www.Worldbank.Org. <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- Dědeček, R., & Dudzich, V. (2022). *Exploring the limitations of GDP per capita as an indicator of economic development : a cross-country perspective*. 22(3), 193–217. <https://doi.org/10.2478/revecp-2022-0009>
- Ghozi, S. (2018). Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. *Jurnal Matematika*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.24843/JMAT.2018.v08.i01.p93>
- Gnangnon, S. K. (2025). Tax Revenue Instability And Tax Revenue In Developed And Developing Countries. *Applied Economic Analysis*, 30(88), 18–37. <https://doi.org/10.1108/AEA-09-2020-0133>
- Ha, N. M., Minh, P. T., & Binh, Q. M. Q. (2022). The Determinants of Tax Revenue: A Study of Southeast Asia. *Cogent Economics & Finance*, 10(2026660). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2026660>
- Hijrawati, Wibawa, G. N. A., Yahya, I., & Baharuddin. (2022). Analisis Regresi Data Panel Pada Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Sulawesi Tenggara Tahun 2017-2020. *Jurnal Matematika Komputasi Dan Statistika*, 2(3), 1–9. <https://doi.org/doi.org/10.33772/jmks.v2i3.25>
- Liapis, K. J., Politis, E. D., Ntertsou, D., & Thalassinou, E. I. (2020). Investigating the

- Relationship between Tax Revenues and Tax Ratios : An Empirical Research for Selected OECD Countries. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(1), 215–229.
- Listikarini, D. I. (2024). Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan : Studi Negara Amerika Latin. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 11(1), 69–88. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.06>
- Listikarini, D. I., & Wijaya, S. (2023). Moderasi Keterbukaan Perdagangan Pada Pendapatan Per Kapita dan Foreign Direct Investment Terhadap Penerimaan Pajak di ASEAN-5. *Educoretax*, 3(3), 145–159. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.471>
- Munandar, A. (2017). Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 8(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jiegmk.v8i1.246>
- Permana, N., & Nursaidah. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Studia Ekonomika Volume*, 17(1), 125–140. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v17i1.134>
- Pyvavar, I., Sokolova, N., & Lyashenko, V. (2023). Estimating the Relationship Between Inflation and Tax Revenues in Selected European Countries : Austria , Germany , France , United Kingdom and Italy. *International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research*, 7(4), 55–62.
- Septiani, A. S., & Sastradipraja, U. (2023). Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Pertumbuhan Ekonomi Dan tarif Pajak Terhadap Tax Ratio Negara ASEAN 2015-2021. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(1), 199–215. <https://doi.org/10.23969/oikos.v8i1>
- Septianingsih, A. (2022). Pemodelan Data Panel Menggunakan Random Effect Model Untuk Mengetahui Faktor Yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup Di Indonesia. *Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika Dan Statistika*, 3(3), 525–536. <https://doi.org/10.46306/lb.v3i3>
- Syahrullah, A. F. (2025). Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Industri terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(2), 362–371. <https://doi.org/10.52447/map.v10i2.8953>
- Taubinsky, D., & Rees-jones, A. (2018). Attention Variation and Welfare : Theory and Evidence from a Tax Salience Experiment. *Review of Economic Studies*, 1–35. <https://doi.org/10.1093/restud/rdx069>
- Todorovic, J. Đ., Dordevic, M., Mirovic, V., Kalaš, B., & Pavlovi, N. (2024). Modeling Tax Revenue Determinants: The Case of Visegrad. *Economies*, 12(6), 131. <https://doi.org/10.3390/economies12060131>
- World_Bank. (2024). *The Middle Income Trap*. World Development Report 2024. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-2078-6>
- Wulandari, D., & Wijaya, S. (2024). Trade Openness And Service Sector For Income tax Revenue: Exploring Government Expenditure’S Role Within. *Educoretax*, 4(2), 141–158. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i2.730>
- Yossinomita, Y., Hartanti, R., & Junaidi, J. (2025). The Impact of Tax Reform on Tax Ratios : A Comparative Analysis of the Transition from the Official Assessment System to the Self-Assessment System in Indonesia and Selected Asian Countries. *Journal of Tax Reform*, 11(2), 282–305. <https://doi.org/10.15826/jtr.2025.11.2.202> eISSN